BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal terkait penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada website onlyfans berdasarkan studi putusan no: 23/Pid.B/2022/PN. Wat:

1. Penerapan unsur tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada website onlyfans. Terdakwa F terbukti memenuhi unsur tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa meliputi memproduksi, menyebarluaskan, memperjualbelikan, dan menyediakan konten pornografi melalui website onlyfans. Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi dengan sistem berlangganan berbayar;
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dimana Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur dalam UU Pornografi. Pertimbangan sosiologis bahwa perbuatan terdakwa berpotensi mempengaruhi moral masyarakat, terutama anak muda. Pertimbangan kriminologis dan psikologis Terdakwa F dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan menjual konten-

konten pornografi, terdakwa F juga mengalami gangguan psikologis eksibisionis.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkat efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan pidana pornografi digital yaitu:

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, memperkuat regulasi terkait pengawasan platform digital berbasis luar negeri, seperti Onlyfans, agar tidak menjadi tempat penyebaran konten ilegal di Indonesia;
2. Bagi aparat penegak hukum, memperkuat koordinasi antara kominfo, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani kasus yang berkaitan dengan konten ilegal di platform luar negeri;
3. Bagi masyarakat, mengedukasi generasi muda tentang bahaya pornografi digital dan dampak hukum nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Di Indonesia*, PT Nusa Persada, Tangerang Selatan.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Umi Rozah, 2015, *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Alimudin Siregar, 2019, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Sumber Lainnya

- Galih Haidar, 2020, Pornografi Pada Kalangan Remaja, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.7 No.1
- Herio Ramadhona, 2022, Penggunaan Platform Aplikasi Onlyfans Untuk Cyber Pornografi, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol.1 No.10
- Louisa Yesami Krisnalita, 2022, Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut, *Jurnal Justice Voice*, Vol.1 No.2
- Martini, 2021, Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, Vol.19 No.2
- Putri Aisyah Cahyani, 2023, Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pornografi Bagi Pelaku Dengan Eksibionisme, *Jurnal Swara Justisia*, Vol.6 No.2

- Robbil Iqsal Mahendra, 2021, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi, *Jurnal Criminal Law and Criminology*, Vol.2 No.2
- Suhaimi, 2018, Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Yustitia*, Vol.19 No.2
- Suratman, 2014, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1 No.2
- Titik Suharti, 2011, Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi, *Jurnal Perspektif*, Vol.16 No.2
- Tsania Ghaita, 2021, Kajian Netnografi Aktivitas Komersialisasi Tubuh Para Kreator Onlyfans, *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol.5 No.1